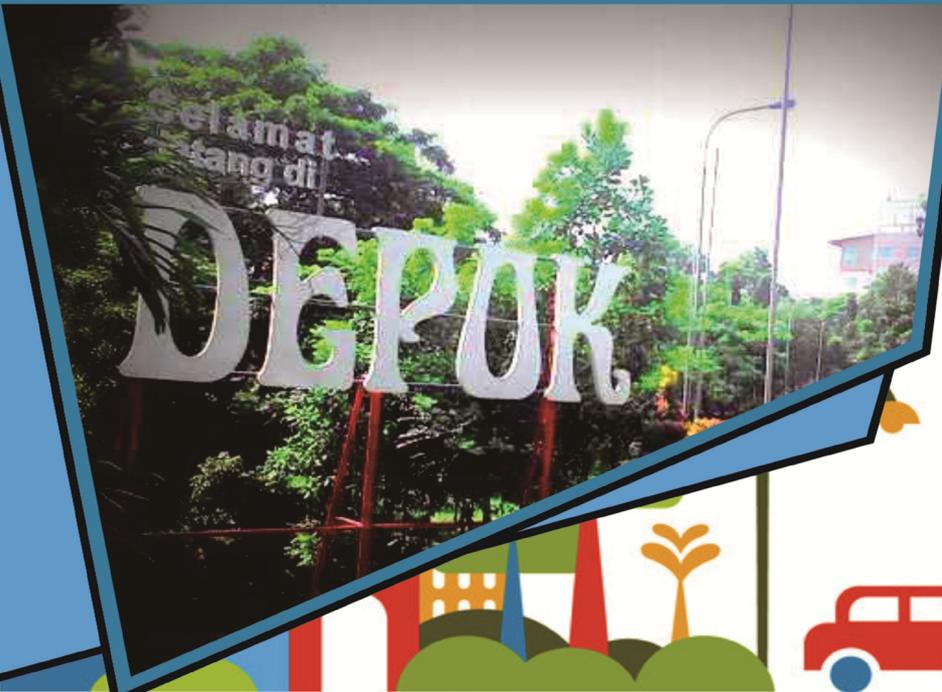




INDIKATOR EKONOMI KECAMATAN KOTA DEPOK

2016



KERJASAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DEPOK





INDIKATOR EKONOMI KECAMATAN KOTA DEPOK

2016





Indikator Ekonomi Kecamatan Kota Depok 2016

No. Publikasi / *Publication Number* : 3276.1723
No. Katalog / *Catalog Number* : 9302011.3276
Ukuran Buku / *Book Size* : 28 Cm x 21,5 Cm
Jumlah Halaman / *Total Size* : 104 Halaman / *page*

Naskah / *Manuscript*:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Depok

Gambar Kulit dan Setting / *Cover Design and Setting* :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Depok

Diterbitkan Oleh / *Published By*:
BPS Kota Depok

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya
May be cited with reference to the sources





Kata Sambutan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, buku Indikator Ekonomi Kecamatan di Kota Depok Tahun 2016 dapat diterbitkan. Buku Indikator Ekonomi Kecamatan Tahun 2016 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan di Kota Depok, khususnya untuk bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan di kecamatan. Buku ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik masyarakat maupun institusi pemerintah dan swasta.

Kepada Badan Pusat Statistik Kota Depok yang sudah banyak membantu dalam penyusunan buku ini disampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih, juga kepada semua pihak yang telah berperan dalam penerbitan Buku Indikator Ekonomi Kecamatan Kota Depok Tahun 2016 disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, Desember 2017
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok,

Dr. Ir. Sidik Mulyono, M.Eng
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19670124 198602 1 001



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT, publikasi Indikator Ekonomi Kecamatan di Kota Depok Tahun 2016 dapat diterbitkan.

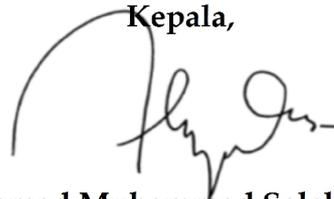
Indikator Ekonomi Kecamatan di Kota Depok Tahun 2016 yang menyajikan Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan menurut lapangan usaha yang terdiri dari 17 kategori diharapkan dapat memberi gambaran secara makro hasil pembangunan setiap kecamatan di Kota Depok khususnya untuk mengetahui perekonomian secara umum.

Kami sadari publikasi ini masih belum sempurna, kekurangan dan kesalahan mungkin saja terjadi. Untuk perbaikan yang akan datang kritik dan saran sangat kami nantikan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga publikasi ini dapat diterbitkan. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat untuk keperluan penelitian, evaluasi dan perencanaan di Kota Depok.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, Desember 2017
Badan Pusat Statistik Kota Depok
Kepala,



Ahmad Muhammad Saleh, SE
NIP. 19670424 199403 1 002



Daftar Isi

Kata Sambutan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Kegiatan Ekonomi	3
1.4. Konsep dan Definisi	5
1.5. Konsep Pendapatan Regional	7
BAB II METODOLOGI	10
2.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan	10
2.2. Beberapa Pendekatan Penyusunan PDRB Kecamatan	10
2.3. Pendapatan Regional	12
2.4. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	12
2.5. PDRB Kecamatan Per Kapita	12
2.6. Metode Penghitungan PDRB Kecamatan menurut Lapangan Usaha	12
2.7. Penyajian Angka Indeks	17
2.8. Cara Penyajian	18
BAB III URAIAN KATEGORI LAPANGAN USAHA	20
3.1. Kategori A: PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN ..	20
3.2. Kategori B : PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	27
3.3. Kategori C: INDUSTRI PENGOLAHAN	29
3.4. Kategori D: PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	38



Indikator Ekonomi Kecamatan Kota Depok Tahun 2016

3.5. Kategori E: PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, DAN DAUR ULANG	40
3.6. Kategori F: KONSTRUKSI	41
3.7. Kategori G : PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR.....	43
3.8. Kategori H: TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN.....	45
3.9. Kategori I : PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	50
3.10. Kategori J: INFORMASI DAN KOMUNIKASI	52
3.11. Kategori K: JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	54
3.12. Kategori L: REAL ESTAT.....	64
3.13. Kategori M dan N: JASA PERUSAHAAN	64
3.14. Kategori O: ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	67
3.15. Kategori P: JASA PENDIDIKAN	68
3.16. Kategori Q: JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL.....	68
3.17. Kategori R, S, T, U: JASA LAINNYA.....	69
BAB IV PDRB KECAMATAN KOTA DEPOK TAHUN 2016	73
4.1. Umum	73
4.2. Kecamatan Sawangan	75
4.3. Kecamatan Bojongsari	75
4.4. Kecamatan Pancoran Mas	75
4.5. Kecamatan Cipayung	76
4.6. Kecamatan Sukmajaya	76
4.7. Kecamatan Cilodong	77
4.8. Kecamatan Cimanggis	77
4.9. Kecamatan Tapos	77
4.10. Kecamatan Beji	78
4.11. Kecamatan Limo	78
4.12. Kecamatan Cinere	79



Daftar Tabel

Tabel 1. Kondisi Perekonomian Kecamatan di Kota Depok 2016	74
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2016 (Juta Rp).	80
Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2010 dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2016 (Juta Rp)	83
Tabel 4. Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2016 (persen)	86
Tabel 5. Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2010 dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2016 (persen)	89
Tabel 6. Sharing Setiap Sub Sektor Ekonomi di Kecamatan dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 (persen)	92
Tabel 7. Sharing Setiap Sub Sektor Ekonomi di Kecamatan dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016 (persen)	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kerja antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999; Blakely, 1989).

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah memerlukan bermacam-macam data statistik yang akan digunakan sebagai bahan analisis untuk menentukan dan mengarahkan sasaran pembangunan. Kebijakan pembangunan ekonomi yang diambil pada masa-masa yang lalu perlu dievaluasi hasil dan implikasinya pada masyarakat. Dengan demikian data statistik yang merupakan ukuran kuantitas sangat diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan masa lalu dan keadaan masa sekarang serta sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha peningkatan produktifitas melalui proses produksi dengan cara pemanfaatan sumberdaya potensial yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya ekonominya secara optimal guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad,1999).

Untuk mencermati perkembangan pembangunan ekonomi di suatu daerah, dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya (*economic growth*). Tingkat pertumbuhan ekonomi atau kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan disamping indikator makro lainnya seperti tingkat penciptaan kesempatan kerja (*employment*) dan kestabilan harga (*price stability*).

Dengan demikian pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

1.2. Maksud dan Tujuan

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah memerlukan bermacam-macam data indikator ekonomi yang dapat dijadikan bahan untuk evaluasi pembangunan ekonomi yang telah tercapai dan perencanaan dimasa yang akan datang.

Salah satu data statistik indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro pada level kecamatan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan yang disajikan secara series.

Pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan selama ini telah menyentuh seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu evaluasi hasil pembangunan di daerah memerlukan gambaran keadaan ekonomi. Untuk itu data statistik indikator ekonomi yang berupa PDRB Kecamatan Kota Depok sangat diperlukan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan selama ini serta kaitannya dengan

menentukan sasaran-sasaran pembangunan pada masa yang akan datang sampai level kecamatan.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan masyarakat, mengusahakan penggeseran kegiatan ekonomi dari sektor Primer ke sektor Sekunder dan Tersier serta meningkatkan ekspor ke luar negeri.

Dengan tersedianya data statistik Indikator Ekonomi Kecamatan berupa PDRB Kecamatan secara berkala dapat diketahui antara lain :

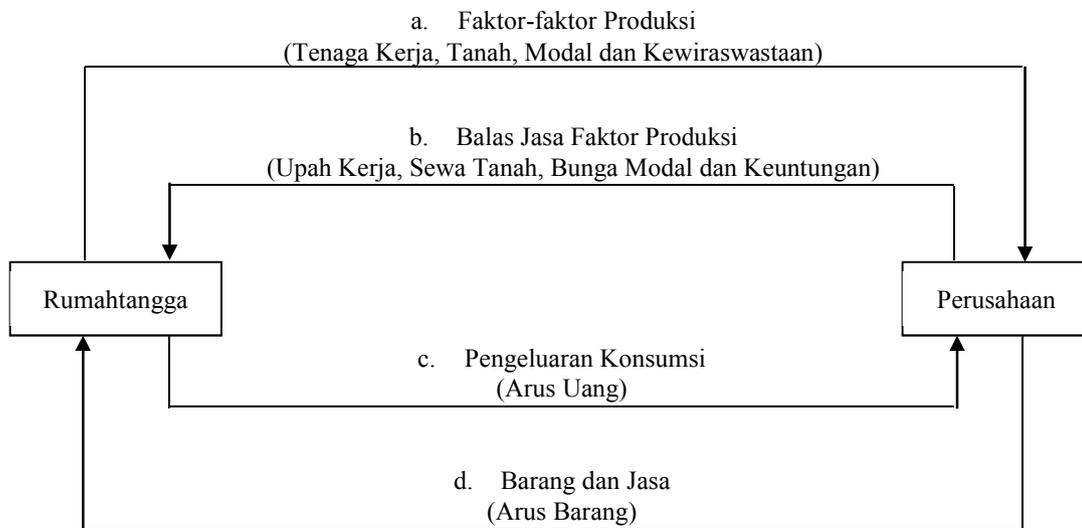
- a. Kemampuan sumber daya ekonomi masing-masing kecamatan yang diperlihatkan oleh nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku.
- b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi masing-masing kecamatan yang diperoleh dari Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.
- c. Tingkat kemakmuran penduduk di suatu kecamatan dengan membandingkan PDRB perkapita dengan kecamatan lain.
- d. Tingkat inflasi masing-masing kecamatan yang merupakan persentase perubahan Indeks Harga Implisit dua tahun yang berurutan. Peningkatan pendapatan akan tidak berarti jika tingkat inflasi tinggi. Dengan kata lain peningkatan pendapatan tidak berarti bila diiringi dengan penurunan daya beli uang (Rupiah) terhadap barang dan jasa (terbatasnya persediaan barang dan jasa).
- e. Gambaran struktur perekonomian masing-masing kecamatan yang merupakan kontribusi masing-masing sektor kegiatan ekonomi terhadap pembentukan PDRB.

1.3. Kegiatan Ekonomi

Siklus kegiatan ekonomi sebagai prinsip dasar ekonomi makro merupakan interaksi antara produsen dan konsumen melalui berbagai transaksi yang terjadi,

Indikator Ekonomi Kecamatan Kota Depok Tahun 2016

baik mengenai arus barang dan jasa maupun faktor-faktor produksi yang beroperasi dalam kegiatan ekonomi tersebut. Kelompok produsen menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen adalah: Tenaga kerja, Tanah, Modal dan Kewiraswastaan. Balas jasa faktor produksi adalah : Upah/gaji, Sewa tanah, Bunga modal dan Keuntungan. Sewa tanah, bunga modal dan keuntungan untuk selanjutnya dikatakan Surplus Usaha (dalam prakteknya sulit dipisahkan). Jumlah dari balas jasa atas keempat faktor produksi tersebut dikatakan **nilai tambah (value added)**. Siklus kegiatan ekonomi ini secara sederhana digambarkan sebagai berikut :



Secara umum kegiatan ekonomi di atas diuraikan dalam format Neraca Produksi suatu usaha sebagai berikut:

Pendapatan/Penerimaan	Pengeluaran/Pembayaran
1. Output antara	5. Input antara
2. Konsumsi akhir	6. Impor barang dan jasa
3. Investasi (Pembentukan barang modal dan perubahan stok)	7. Upah/gaji
4. Ekspor barang dan jasa	8. Surplus usaha *)
	9. Penyusutan
	10. Pajak tak langsung neto **)

*) Sewa tanah + Bunga modal + Keuntungan

***) Pajak tak langsung – Subsidi



1.4. Konsep dan Definisi

Beberapa penjelasan mengenai pengertian PDRB, PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan, pendapatan regional, pendapatan perkapita dan lainnya diuraikan di bawah ini.

1.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dapat diartikan ke dalam 3 pengertian yaitu :

a. Pendekatan Produksi (*Production approach*)

PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah/*region* pada suatu jangka waktu tertentu, biasanya setahun. Formulasi penghitungan nilai tambah bruto pendekatan produksi sebagai berikut :

$$\text{NTB} = \text{Nilai Produksi (NP)} - \text{Biaya Antara (BA)}$$

b. Pendekatan Pendapatan (*Income approach*)

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut didalam proses produksi di suatu wilayah/*region* pada jangka waktu tertentu (setahun). Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Dalam pengertian PDRB termasuk pula penyusutan barang modal dan pajak tidak langsung netto (Pajak tak langsung – subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

$$\text{Nilai Tambah Bruto (NTB)} = \text{Upah/gaji} + \text{Surplus usaha} + \text{Penyusutan} + \text{Pajak tak langsung netto}$$

c. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure approach*)

PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (lembaga nirlaba), konsumsi



=====

pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, ekspor neto di suatu wilayah/*region*. Ekspor neto disini adalah ekspor dikurangi import.

NTB = Konsumsi akhir (Rumahtangga, pemerintah dan lembaga nirlaba) +
Pembentukan modal tetap bruto + Perubahan stok + ekspor neto

1.4.2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB yang dinilai berdasarkan harga pada tahun berjalan, baik pada saat menilai produksi, biaya antara maupun komponen nilai tambah.

1.4.3. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

PDRB yang dinilai berdasarkan harga pada tahun tertentu atau tahun dasar, baik pada saat menilai produksi, biaya antara maupun komponen nilai tambah.

1.4.4. Indeks Harga Implisit PDRB

Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan.

1.4.5. Laju Pertumbuhan PDRB

Besarnya persentase kenaikan PDRB pada tahun berjalan terhadap PDRB pada tahun sebelumnya. Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan biasanya disebut **Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**.

1.4.6. PDRB Perkapita

PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun.

1.4.7. Pendapatan Regional

PDRB ditambah balas jasa faktor produksi milik penduduk wilayah/*region* tersebut yang berasal dari luar dikurangi balas jasa faktor produksi yang mengalir keluar.

1.4.8. Pendapatan Perkapita

Pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sehubungan dengan penghitungan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk Kota Depok sulit dilakukan karena masih belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir antar kabupaten/kota, maka sampai saat ini penyajian data ekonomi makro hanyalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian angka PDRB ini merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan daerah tersebut untuk menghasilkan pendapatan atau balas jasa faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Dengan kata lain PDRB merupakan gambaran “*product originated*”.

1.5. Konsep Pendapatan Regional

1.5.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar

Angka Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar diperoleh dengan menjumlahkan Nilai Tambah Bruto (*Gross Value Added*) yang ada dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah.

1.5.2. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar

Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar merupakan hasil pengurangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar dan penyusutan.

1.5.3. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) Atas Dasar Harga Faktor

Jika PDRN Atas Dasar Harga Pasar dikurangi Pajak Tidak Langsung Netto maka diperoleh PDRN Atas Dasar Biaya Faktor. Pajak tidak langsung ini meliputi pajak pertambahan nilai, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak penghasilan dan pajak perseroan. Pajak tidak langsung dari unit-unit produksi dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli sehingga mengakibatkan kenaikan harga barang. Subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit

produksi dapat mengakibatkan penurunan harga. Pajak tidak langsung dikurangi subsidi diperoleh pajak tidak langsung.

1.5.4. Pendapatan Regional

Dari beberapa konsep yang diterangkan di atas, ternyata PDRN atas dasar biaya faktor merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang turut dalam proses produksi di region tersebut. PDRN atas dasar biaya faktor merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan yang ada atau merupakan pendapatan yang berasal dari region tersebut. Pendapatan yang dihasilkan itu tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk region tersebut karena ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk region lain. Jika pendapatan regional dibagi jumlah penduduk yang tinggal di region dimaksud maka menghasilkan suatu pendapatan perkapita.

1.5.5. Pendapatan Perorang (*Personal Income*) dan Pendapatan Yang Siap Dibelanjakan (*Disposable Income*)

Berdasarkan uraian di atas, konsep-konsep yang dipakai dalam pendapatan regional dapat diurutkan sebagai berikut :

- (1). PDRB Atas Dasar Harga Pasar (*GRDP At Market Prices*). Minus : Penyusutan, akan sama dengan
- (2). PDRN Atas Dasar Harga Pasar (*NRDP At Market Prices*). Minus : Pajak tidak langsung netto, akan sama dengan
- (3). PDRN Atas Dasar Biaya Faktor (*NRDP At Factor Cost*). Plus : Pendapatan netto yang mengalir dari luar daerah / luar negeri, akan sama dengan
- (4). Pendapatan Regional (*Regional Income*). Minus : Pajak pendapatan perusahaan (*Corporate Income Taxes*), keuntungan yang tidak dibagikan (*Undistributed Profit*), iuran kesejahteraan sosial (*Social Security Contribution*). Plus : Transfer yang diterima oleh rumahtangga, bunga netto atas hutang pemerintah, akan sama dengan

(5). Pendapatan Perorang (*Personal Income*). Minus : Pajak rumahtangga, transfer yang dibayarkan oleh rumahtangga, akan sama dengan

(6). Pendapatan yang siap dibelanjakan (*Disposable Income*).

Diagram susunan agregat pendapatan regional dapat dilihat pada halaman berikut ini.

SUSUNAN AGREGAT PENDAPATAN REGIONAL

Susunan Agregat Pendapatan Regional Terdiri dari :

- Upah dan Gaji
- Sewa Tanah, Royalti
- Bunga Modal
- Keuntungan (deviden dan laba ditahan)
- Penyusutan
- Pajak tidak langsung neto

Biaya antara (bibit, pupuk, obat-obatan, bahan baku, bahan penolong, listrik, jasa perbankan, alat-alat, sewa bangunan dan mesin, jasa lainnya, dan sebagainya tidak termasuk pembelian barang modal

Penyusutan

Pajak tidak langsung neto

Pajak pendapatan perusahaan, keuntungan yang tidak dibagikan, iuran kesejahteraan sosial

Pajak Rumahtangga + Transfer oleh rumahtangga

Pendapatan netto dari luar daerah/luar negeri

Transfer yang diterima rumahtangga + Bunga netto hutang pemerintah

Singkatan

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
 PDRN : Produk Domestik Regional Netto
 PRN : Produk Regional Netto

- Total Output
- PDRB atas dasar harga pasar
- PDRN atas dasar harga pasar
- PDRN atas dasar harga faktor
- PRN biaya faktor (pendapatan regional)
- Pendapatan orang seorang (personal income)
- Pendapatan siap dibelanjakan (disposable income)

BAB II

METODOLOGI

2.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu kecamatan pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, tanpa memperhitungkan kepemilikan.

2.2. Beberapa Pendekatan Penyusunan PDRB Kecamatan

Pendekatan penyusunan PDRB Kecamatan atas dasar harga berlaku dapat dihitung melalui dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang dimaksud metode langsung adalah metode penghitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari data dasar masing-masing kecamatan. Metode langsung tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan 3 macam pendekatan yaitu: pendekatan produksi (*Production Approach*), pendekatan pendapatan (*Income Approach*), dan pendekatan pengeluaran (*Expenditure Approach*). Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi yaitu mengalokir PDRB Kecamatan dengan memakai berbagai macam indikator produksi atau indikator lainnya yang cocok sebagai alokator.

Atas dasar pertimbangan ketersediaan data yang ada, maka PDRB Kecamatan Kota Depok ini disusun menggunakan metode campuran, yaitu metode langsung dan tidak langsung sekaligus. Untuk metode langsungnya hanya digunakan pendekatan produksi.



2.2.1. Pendekatan Produksi

Pendekatan dari segi produksi adalah menghitung nilai tambah dengan cara mengurangi biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap-tiap sektor atau sub sektor.

2.2.2. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang termasuk dalam surplus usaha disini adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan kotor.

2.2.3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa di dalam suatu wilayah. Jadi produk domestik regional bruto diperoleh dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang membentuk produk domestik regional tersebut. Secara umum pendekatan pengeluaran dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a. Melalui pendekatan penawaran yang terdiri dari metode arus barang, metode penjualan eceran dan metode penilaian eceran.
- b. Melalui pendekatan permintaan yang terdiri dari pendekatan survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, metode data anggaran belanja, metode balance sheet dan metode statistik luar negeri.

Pada prinsipnya kedua cara ini dimaksudkan untuk memperkirakan komponen-komponen permintaan akhir seperti: konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto dan perdagangan antar wilayah (termasuk ekspor dan impor antar negara).





2.3. Pendapatan Regional

Istilah Pendapatan Regional merupakan sebutan yang lebih populer dalam publikasi PDRB. Namun dalam kenyataannya, pendapatan regional sulit untuk dihitung mengingat sukarnya mendeteksi arus pendapatan yang mengalir antar wilayah regional. Oleh karena keterbatasan tersebut, maka yang sering atau umum dipakai adalah Produk Domestik Regional Netto (PDRN). PDRN Atas Biaya Faktor Produksi merupakan PDRB setelah dikeluarkan biaya penyusutan barang-barang modal karena aus akibat digunakan dalam proses produksi, dan pajak tidak langsung netto (pajak setelah dikurangi subsidi pemerintah).

2.4. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun

Jumlah penduduk yang biasa digunakan sebagai pembagi dalam penghitungan PDRB agar diperoleh nilai per kapita adalah jumlah penduduk pertengahan tahun. Jumlah penduduk tersebut merupakan rata-rata jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan penduduk pertengahan tahun adalah jumlah penduduk pada akhir tahun ditambah penduduk awal tahun dibagi dua.

2.5. PDRB Kecamatan per Kapita

PDRB Kecamatan per kapita merupakan hasil pembagian PDRB Kecamatan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun kecamatan yang bersangkutan.

2.6. Metode Penghitungan PDRB Kecamatan menurut Lapangan Usaha

Beberapa metode yang digunakan untuk menghitung nilai PDRB suatu wilayah, antara lain Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung. Metode yang digunakan secara garis besar adalah sebagai berikut:



2.6.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Dalam melakukan penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

2.6.1.1. Metode Langsung

Metode Langsung adalah melakukan penghitungan PDRB yang didasarkan kepada data yang tersedia di lapangan secara rutin. Dalam metode langsung ini ada tiga pendekatan, yaitu:

- Pendekatan Produksi
- Pendekatan Pendapatan
- Pendekatan Pengeluaran

Ketiga pendekatan ini sudah diuraikan pada bagian sebelumnya dan secara teoritis ketiga pendekatan tersebut akan memberikan hasil yang sama.

2.6.1.2. Metode Tidak Langsung/Alokasi

Penghitungan nilai tambah bruto suatu kegiatan ekonomi/sector dengan metode tidak langsung adalah dengan mengalokasikan nilai tambah bruto suatu kegiatan ekonomi Nasional/regional Propinsi/Kota ke dalam masing-masing kegiatan ekonomi pada tingkat regional kecamatan dengan menggunakan indikator yang mempunyai pengaruh paling erat dengan kegiatan ekonomi tersebut. Secara matematis ditulis sebagai berikut :

$$NTB_k = \frac{Q_k}{Q_p} NTB_p$$

Dimana :

NTB_k = Nilai tambah bruto tingkat kecamatan

NTB_p = Nilai tambah bruto tingkat kota

Q_k = Produksi/Indikator produksi tingkat kecamatan

Q_p = Produksi/Indikator produksi tingkat kota

2.6.2. PDRB Kecamatan Atas Dasar Harga Konstan 2010

PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB atau perekonomian secara riil yang kenaikannya/pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/deflasi.

Ada empat cara yang dikenal untuk menghitung nilai tambah bruto (NTB) atas dasar harga konstan, yaitu :

2.6.2.1. Revaluasi

Metoda revaluasi menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun atau tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (2010). Hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar harga konstan (tahun 2010). Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih nilai output dan biaya antara. Dalam praktek sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan, karena mencakup komponen input yang sangat banyak, disamping data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan masing-masing tahun dengan ratio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

$$NP_{t_0} = Q_t P_0$$

$$NTB_{t_0} = [1 - RBA_0] NP_{t_0}$$

Dimana :

NP_{t_0} = Nilai produksi atas dasar harga konstan (adhk) tahun t

NTB_{t_0} = Nilai tambah bruto adhk tahun t

Q_t = Produksi/indikator produksi tahun t

P_0 = Harga tahun dasar

RBA_0 = Ratio biaya antara tahun dasar

2.6.2.2. Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah masing-masing sektor harga konstan pada tahun dasar 2010 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatan yang dihitung. Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap penghitungan output atas dasar harga konstan kemudian dengan menggunakan ratio tetap nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

$$NP_{t_0} = \frac{NP_0 IQ_t}{100}$$

Dimana :

NP₀ = Nilai produksi tahun dasar

IQ_t = Indeks kuantum tahun t

2.6.2.3. Deflasi

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga yang berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan indeks harga konsumen (IHK), indeks harga perdagangan besar (IHPB) dan sebagainya. Indeks harga di atas dapat pula dipakai sebagai inflator dalam keadaan dimana nilai tambah atas dasar harga yang berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

$$NTB_{t_0} = \frac{100 NTB_t}{IH_t}$$

Dimana :

NTB_t = Nilai tambah bruto tahun t

NTB_{t_0} = Nilai tambah bruto adhk tahun t

IH_t = Indeks Harga tahun t

2.6.2.4. Deflasi Berganda

Dalam deflasi berganda ini, yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar sesuai dengan cakupan komoditinya, sedangkan indeks harga untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar. Kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, disamping karena komponennya terlalu banyak, juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai. Penghitungan komponen penggunaan PDRB atas dasar harga konstan juga dilakukan dengan menggunakan cara-cara di atas, tetapi mengingat data yang tersedia maka digunakan cara deflasi dan ekstrapolasi.

$$BA_{t_0} = \frac{100 BA_t}{IH_t} \quad NP_{t_0} = \frac{100 NP_t}{IH_t} \quad NTB_{t_0} = NP_{t_0} - BA_{t_0}$$

Dimana :

NTB_{t_0} = Nilai tambah bruto adhk tahun t

NP_t = Nilai produksi tahun t

BA_t = Biaya Antara tahun t

BA_{t_0} = Biaya Antara adhk tahun t

2.6.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) atau *Economic Growth* merupakan indeks berantai dari masing-masing kegiatan ekonomi. Angka indeks yang dihasilkan bisa didasarkan atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Pada umumnya yang sering digunakan atau dianalisis oleh para ekonom adalah LPE harga konstan, karena menggambarkan pertumbuhan produksi riil dari masing-masing sektor.

Laju pertumbuhan ekonomi kecamatan diperoleh dengan cara membagi selisih nilai PDRB Kecamatan tiap sektor/sub sektor tahun berjalan dan tahun sebelumnya dengan PDRB Kecamatan tiap sektor/sub sektor tahun sebelumnya dikalikan 100.

2.7. Penyajian Angka Indeks

Untuk mempermudah dalam menganalisisnya, PDRB disamping disajikan dalam bentuk angka absolut, disajikan juga dalam bentuk angka indeks. Secara rinci angka indeks tersebut adalah sebagai berikut:

2.7.1. Indeks Perkembangan

Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan pendapatan/perekonomian dari tahun ke tahun yang dibandingkan dengan tahun dasar. Indeks tersebut dirumuskan sebagai berikut :

$$IP = \frac{PDRB_{it}}{PDRB_{i0}} \times 100 \%$$

Dimana :

IP = Indeks Perkembangan

i = Kategori 1 ... 17

t = Tahun t

0 = Tahun dasar

2.7.2. Indeks Berantai

Indeks ini menunjukkan tingkat pertumbuhan agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indeks berantai

diperoleh dengan cara membagi nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun sebelumnya dikalikan 100. Indeks berantai dirumuskan sebagai berikut :

$$IB = \frac{PDRB_{it}}{PDRB_{i(t-1)}} \times 100 \%$$

Dimana :

IB = Indeks berantai

i = Kategori 1 ... 17

t = Tahun t

t-1 = Tahun sebelumnya

2.7.3. Indeks Implisit

Indeks ini merupakan indikator tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar. Indeks Implisit diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan nilai sejenis atas dasar harga konstan kemudian dikalikan 100. Indeks Implisit dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$IH = \frac{PDRB_{hb\ it}}{PDRB_{hk\ it}} \times 100 \%$$

Dimana:

IH = Indeks Implisit

i = Kategori 1 ... 17

t = Tahun t

hb = Harga berlaku

hk = Harga konstan

2.8. Cara Penyajian

Penyajian PDRB Kecamatan dibedakan dalam dua bentuk :

- a. Penyajian PDRB Kecamatan Atas Dasar Harga Berlaku

Penyajian PDRB Kecamatan atas dasar harga berlaku ini untuk melihat besarnya PDRB Kecamatan berdasarkan harga pada tahun tersebut.

b. Penyajian PDRB Kecamatan Atas Dasar Harga Kostan (2010)

Penyajian PDRB Kecamatan atas dasar harga konstan 2010 ini untuk melihat perkembangan nilai PDRB Kecamatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan riil dan bukan disebabkan kenaikan harga.

Untuk dapat menggambarkan perkembangan kegiatan ekonomi di setiap kategori, maka penyajian PDRB Kecamatan dirinci menurut 17 kategori lapangan usaha yaitu :

- 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. (A)
- 2) Pertambangan dan Penggalian. (B)
- 3) Industri Pengolahan. (C)
- 4) Pengadaan Listrik dan Gas. (D)
- 5) Pengadaan Air. (E)
- 6) Konstruksi. (F)
- 7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor. (G)
- 8) Transportasi dan Pergudangan. (H)
- 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. (I)
- 10) Informasi dan Komunikasi. (J)
- 11) Jasa Keuangan. (K)
- 12) Real Estat. (L)
- 13) Jasa Perusahaan. (M, N)
- 14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. (O)
- 15) Jasa Pendidikan. (P)
- 16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. (Q)
- 17) Jasa Lainnya. (R, S, T, U)

BAB III

URAIAN KATEGORI LAPANGAN USAHA

Uraian kategori lapangan usaha yang disajikan pada bagian ini mencakup ruang lingkup dari masing-masing kategori kegiatan ekonomi dan cara-cara penghitungan nilai tambah bruto (NTB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 serta dengan sumber data yang digunakan.

3.1. Kategori A: PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

1). Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian.

Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

a. Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll).

Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman

semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS.

Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS.

b. Tanaman Hortikultura

Subkategori tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman.

Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari Subdit Statistik Hortikultura, BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit

Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

c. Tanaman Perkebunan

Subkategori Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dsb.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

d. Peternakan

Subkategori Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Subkategori ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang

.....

menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Peternakan (Ternak Besar dan Kecil, Ternak Unggas, dan Sapi Perah) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Peternakan BPS.

e. Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk

penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari Subdit Neraca Barang BPS. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS. Sedangkan untuk kegiatan perburuan dan pengkapan satwa liar diestimasi menggunakan pendapatan devisa dari penjualan satwa liar yang datanya diperoleh dari Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2). Kehutanan dan Penebangan Kayu.

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari Perum Perhutani, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, dan Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan dan Pembudidaya Tanaman Kehutanan) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Kehutanan BPS.

3). Perikanan.

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS.

Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi.

Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008.

Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources (CBR)*.

Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in-Progress (WIP)*. Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP dari seluruh komoditas ditambah dengan nilai pelengkapnya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara (*intermediate consumption*). Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.



3.2. Kategori B : PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat golongan pokok, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

1). Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi.

Sub kategori Pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Data Harga/Indikator Harga juga diperoleh dari Ditjen Migas, ESDM dan Statistik PLN, dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan; Data Struktur Biaya diperoleh dari Lap. Keuangan Perusahaan, BEI dan Statistik Pertambangan Migas BPS.

Data harga minyak mentah menggunakan *Indonesia Crude Price (ICP)*, harga gas bumi pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP Gas dan Panas bumi. Harga uap panas bumi menggunakan harga panas bumi yang terdapat



=====

pada publikasi tahunan Statistik PLN dan digerakkan dengan IHP gas dan panas bumi untuk mendapatkan harga triwulanan.

2). Pertambangan Batubara dan Lignit.

Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencarian (*liquefaction*). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyarinan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan Lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. NTB atas dasar harga konstan 2010 didapat dengan menggunakan cara yang sama seperti pada subsektor pertambangan migas yaitu revaluasi. Data produksi batubara dan lignit serta Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM; Statistik Pertambangan Non Migas BPS serta beberapa data dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota; Dinas Pendapatan Daerah.

3). Pertambangan Bijih Logam.

Sub kategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya



mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium (bauxit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya. Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

4). Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Sub kategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas.

Termasuk dalam subsektor ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik penggalian tahunan. Sementara itu PDRB triwulan di estimasi menggunakan data produksi bahan galian dari Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi.

3.3. Kategori C: INDUSTRI PENGOLAHAN

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian,



kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan.

Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

1). Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi.

Mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, di mana meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas. KBLI 2009: kode 19.

2). Industri Makanan dan Minuman.

Industri Makanan dan Minuman merupakan gabungan dari dua golongan pokok, yaitu Industri Makanan dan Industri Minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan.

Industri minuman mencakup pembuatan minuman baik minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur. dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup

=====

pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi dan produk the dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.

3). Industri Pengolahan Tembakau.

Pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (snuff), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009: kode 12

4). Industri Tekstil dan Pakaian Jadi.

Sub kategori ini merupakan gabungan dari dua golongan pokok yaitu Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: spreng, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain).

Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

5). Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki.

Golongan pokok ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit

=====

menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 15

6). Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman

Golongan pokok ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, golongan pokok ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan.

Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya: pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. KBLI 2009: kode 16

7). Industri Kertas & Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam.

Subsektor ini merupakan gabungan dari dua golongan pokok yaitu Industri Kertas dan Barang dari Kertas, dan Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekam. Industri Kertas dan Barang dari Kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama.

Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai tehnik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan

pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama.

Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan Industri Pencetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009: kode 17 dan 18.

8). Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional.

Golongan pokok ini terdiri dari dua industri yaitu Industri Kimia dan Industri Farmasi dan Obat Tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk.

Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri Farmasi dan Obat Tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi.

Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009: kode 20 dan 21.

9). Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik.

Golongan pokok ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya; pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, pengolahan dasar plastik atau daur ulang.

Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22.

10). Industri Barang Galian Bukan Logam.

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini. KBLI 2009: kode 23.

11). Industri Logam Dasar.

Golongan pokok ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: industri besi dan baja dasar, penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 24.

12). Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik.

Golongan ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, container/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26 dan 27.



13). Industri Mesin dan Perlengkapan.

Kegiatan yang tercakup dalam golongan pokok Industri Mesin dan Perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya. yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus.

Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28

14). Industri Alat Angkutan.

Golongan pokok ini mencakup Industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta Industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009 : kode 29 dan 30.

15). Industri Furnitur.

Industri Furnitur mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan pembuatan mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009: kode 31.



16). Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Sub kategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Sub kategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Golongan pokok ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum.

Sub kategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya. KBLI 2009: kode 32 dan 33.

Sumber data Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi terdiri dari: Data produksi Pengilangan Migas diperoleh dari, Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Data produksi/indikator produksi Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Industri, BPS. Data harga produk pengilangan minyak bumi diperoleh dari Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga LNG diperoleh dari harga ekspor LNG dari Direktorat Statistik Distribusi, BPS dengan kurs ekspor dari Direktorat Neraca Pengeluaran, BPS; sedangkan indikator harga untuk Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Harga, BPS. Data struktur biaya diperoleh dari Publikasi Statistik Pertambangan Migas, BPS.

Sumber data Industri Makanan dan Minuman sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan terdiri dari: Produksi/Indikator Produksi yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Indeks produksi Industri Besar Sedang (IBS) dan indeks produksi

Industri Mikro dan Kecil (IMK) diperoleh dari Direktorat Statistik Industri,-BPS; Data Harga/Indikator Harga diperoleh dari Direktorat Statistik Harga, BPS; Data Struktur Biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK, BPS ditambah dengan berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP BPS RI

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan Industri Pengolahan Migas menggunakan **pendekatan produksi**. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cara **revaluasi**, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010.

NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk Industri Batubara sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan menggunakan **pendekatan produksi**. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan **ekstrapolasi** yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun.

Sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun.

Adapun untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan Dalam penghitungan NTB Industri pengolahan sub kategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

3.4. Kategori D: PENGADAAN LISTRIK DAN GAS

Kategori D mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

1). Ketenagalistrikan.

Golongan ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) maupun oleh perusahaan swasta (Non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan **pendekatan produksi**. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun.

Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara **revaluasi**, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun

konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non-PLN. Penilaian PDB listrik menggunakan harga dasar, sementara penilaian PDRB listrik menggunakan harga produsen. Harga produsen didapat dengan mengalikan kuantum listrik terjual dengan harga jual tersubsidi. Sementara harga dasar diestimasi dari harga produsen ditambahkan dengan subsidi yang ditanggung oleh pemerintah dan dikurangi pajak.

2). Pengadaan Gas dan Produksi Es.

Golongan ini menghasilkan Gas Alam, Gas Buatan, Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es. Golongan ini mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas.

Golongan ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistim saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistim distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pengubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Metode penghitungan yang digunakan untuk seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh

melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun.

Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara **revaluasi**, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi dan harga gas kota diperoleh dari PT PGN (Persero). Data produksi dilaporkan langsung oleh PT. PGN setiap tiga bulan. Sementara data harga dikutip dari laporan keuangan PT. PGN yang terbit setiap tiga bulanan. Untuk data harga, terdapat jeda satu triwulan sehingga harus diestimasi untuk triwulan terakhir.

3.5. Kategori E: PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, DAN DAUR ULANG

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan Nilai Tambah Bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 sama dengan seri 2000 dengan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun.

Data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sedangkan

output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan Sampah/Limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh Pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Sumber Data: untuk data Produksi adalah Subdit. Statistik Pertambangan dan Energi - BPS, APBD (Kemenkeu); data Output Sampah diperoleh dari Subdit. Statistik Industri Besar Sedang - BPS; Data Harga diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS RI; Data Struktur Biaya diperoleh dari Hasil Survei Tahunan Air Bersih - BPS.

3.6. Kategori F: KONSTRUKSI

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil. baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api,

terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan Output harga berlaku sektor konstruksi adalah metode **ekstrapolasi** dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan Output harga konstan, Output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara input antara didapat dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari input antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi kayu log, bambu dan produk industri bukan migas dari Subdirektorat Neraca Barang-BPS; produksi aspal dari Statistik Perminyakan Indonesia (SPI) Ditjen Migas-Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); ekspor semen dari Subdirektorat Statistik Ekspor-BPS dan Asosiasi Semen Indonesia (ASI); impor semen dan bahan bangunan SITC 3 digit dari

Subdirektorat Statistik Impor-BPS. Indikator harga berupa IHPB bahan bangunan dari Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar-BPS. Indeks konstruksi dari publikasi Statistik Konstruksi, Subdirektorat Statistik Konstruksi-BPS.

3.7. Kategori G : PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

1). Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

Sub kategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2). Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.

Sub kategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir *dalam* pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam sub kategori ini.

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "*commodity flow approach*". Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri.

Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan

indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstan, nilai tambah berlaku yang diperoleh di-deflate menggunakan IHK umum (BPS).

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik (dari Subdit Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi BPS RI.

3.8. Kategori H: TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

1). Angkutan Rel.

Angkutan Rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI).

Metode estimasi yang digunakan yaitu pendekatan produksi. Indikator produksi adalah jumlah penumpang dan barang yang diangkut atau jumlah km-penumpang dan km-ton barang. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diolah dari laporan keuangan PT. KAI. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan rel dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolatornya. NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh berdasarkan perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun 2010.

2). Angkutan Darat.

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan *charter/sewa* kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta *jasa angkutan dengan saluran pipa* untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkutan). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/ armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Subdirektorat Info Lantas POLRI. Data untuk penghitungan struktur output dan rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan PT Perusahaan Pengangkutan Djakarta (Perum PPD), PT Djawatan Angkoetan Motor RI (Perum DAMRI) dan beberapa perusahaan angkutan darat *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan data indikator harga

menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

3). Angkutan Laut.

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode ekstrapolasi, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolatornya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dan PT Djakarta Lloyd, serta IHK jasa angkutan laut dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public* angkutan laut dari Bursa Efek Indonesia.

4). Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT. ASDP Indonesia Ferry.

5). Angkutan Udara.

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai

ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT Angkasa Pura I (Kawasan Tengah dan Timur Indonesia) dan PT Angkasa Pura II (Kawasan Barat Indonesia). Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Airlines dan PT Merpati Nusantara Air-lines; serta IHK jasa angkutan udara dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

6). Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir.

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal & parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public*. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti : PT Angkasa Pura I & II, PT Pelabuhan Indonesia I-IV, PT Jasa Marga, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Bhanda Ghara

Reksa, PT PBM Adhiguna Putera, PT KBN, dan beberapa perusahaan *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

3.9. Kategori I : PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

1). Penyediaan Akomodasi.

Sub kategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi.

Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB sub kategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output

atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Subdit Statistik Pariwisata, BPS. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata, BPS.

2). Penyediaan Makan dan Minum.

Kegiatan sub kategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

Data indikator produksi sub kategori penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010 - BPS. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari publikasi Indikator Ekonomi - BPS.

3.10. Kategori J: INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemrograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd rom buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya, tercakup di sini. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan muatan atau isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program

hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei industri besar dan sedang, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go public* bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang dan Subdit Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi BPS RI, perusahaan *go public* dibidang televisi dan teknologi informasi, Direktorat perfilman Dirjen Ekraf Seni dan Budaya Kemenparekraf, sedangkan kegiatan telekomunikasi diperoleh dari perusahaan telekomunikasi *go public* seperti: PT

rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga.

Output bank sentral (Bank Indonesia) dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan penyusutan. Sedangkan output KSP, BMT dan Jasa Moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya.

Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDRB tanpa Jasa Perantara Keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia.

2). Asuransi dan Dana Pensiun.

Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

a. Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari

tua. Pihak bertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak bertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

b. Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pension. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

3). Jasa Keuangan Lainnya.

Jasa keuangan lainnya meliputi kegiatan jasa keuangan yang mencakup kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

a. Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Pegadaian, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

b. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan leasing lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk *finance lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI.

.....

Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

c. Modal Ventura

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

4). Jasa Penunjang Keuangan.

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

a. Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

.....

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Kegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya.

Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) diperoleh dari PT BEI, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

b. Manager Investasi

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manager investasi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan manager investasi diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

c. Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI).

Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan diperoleh dari PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

d. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

e. Wali Amanat

Wali amanat (*trustee*) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan wali amanat diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

f. Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (*money changer*) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa penukaran mata uang diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

g. Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat

Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

3.12. Kategori L: REAL ESTAT

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estate adalah property berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Susenas dan Sensus Penduduk, BPS (imputasi sewa rumah). Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ), BPS.

3.13. Kategori M dan N: JASA PERUSAHAAN

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.

Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya.

Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

a. Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

b. Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksaan

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya. Termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

c. Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

d. Jasa Periklanan

Jasa periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

e. Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

f. Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

g. Jasa Kebersihan Umum Bangunan

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

=====

Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

3.14. Kategori O: ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan social wajib.

Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini., meskipun dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistim sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari Realisasi APBN. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; Realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah daerah (K1, K2, K3), Badan Pusat Statistik; Realisasi



APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah; Jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

3.15. Kategori P: JASA PENDIDIKAN

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan.

Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan Pendekatan Produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan Pendekatan Deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP dan DNPeng BPS RI; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

3.16. Kategori Q: JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain



=====

sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.

Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Kesehatan; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); Berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP dan DNPeng BPS RI; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

3.17. Kategori R, S, T, U: JASA LAINNYA

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.



a. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R di dalam KBLI 2009. Kategori ini meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah.

Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/ indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan data penunjang intern BPS (Ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen, dan Survei-survei Khusus yang Dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran).

b. Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.



Output atas dasar harga berlaku untuk Jasa Lainnya diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum.

Sumber data yang diperlukan berasal dari data penunjang intern BPS (Sensus Ekonomi, Subdit Statistik Demografi, Susenas, Statistik Harga Konsumen).

c. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T di KBLI 2009, mencakup kegiatan yang memanfaatkan Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB-nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan.

Untuk kegiatan yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan, (pertanian, industri, konstruksi, penggalian) output dan NTB berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS

(SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS, yaitu, Susenas, Sensus Penduduk, Subdit PEK (Publikasi Statistik Air Bersih), dan Survei Khusus yang Dilakukam Direktorat Neraca Pengeluaran.

d. Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori ini berkategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The Internasional Moneter Fund, The World Bank, The World Customs Organization (WHO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan lain-lain.

Output dan NTB berlaku diperoleh dengan pendekatan biaya yang didapatkan dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Sementara, untuk output konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator laju IHK umum.

Sumber data diperoleh dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya yang berkantor pusat di Indonesia dan Statistik Harga Konsumen.



BAB IV
ULASAN SINGKAT
PDRB KECAMATAN KOTA DEPOK
TAHUN 2016

4.1. Umum

Empat kecamatan di Kota Depok yang mempunyai *sharing* terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Depok Tahun 2016 atas dasar harga berlaku adalah Kecamatan Cimanggis (26,43 persen), Kecamatan Cilodong (20,79 persen), Kecamatan Tapos (11,73 Persen), serta Kecamatan Beji (9,78 persen). Tujuh kecamatan lainnya masing-masing mempunyai *sharing* di bawah 8 persen, yaitu Pancoran Mas (7,69 persen), Sukmajaya (6,79 persen), Sawangan (5,23 persen), Cinere (3,35 persen), Bojongsari (3,08 persen), Limo (2,87 persen), dan Cipayung (2,26 persen).

Sharing masing-masing kecamatan pada pembentukan PDRB Kota Depok Tahun 2016 atas dasar harga konstan tahun 2010 juga memperlihatkan pola yang hampir sama. Hal ini memperlihatkan bahwa semua kecamatan di Kota Depok tidak mengalami perbedaan harga berlaku yang mencolok. Karena PDRB atas dasar harga konstan secara riil menggambarkan produksi dari setiap sektor ekonomi tanpa dipengaruhi oleh faktor harga.

Karena PDRB Kecamatan yang dihitung menggunakan pendekatan produksi, maka besaran PDRB Kecamatan menggambarkan besaran produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam wilayah kecamatan tersebut. Sehingga besaran nilai PDRB Kecamatan ini belum dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan, namun dapat menggambarkan produksi barang dan jasa akhir yang dibangkitkan dalam setiap kecamatan. Nilai PDRB Kecamatan yang besar menunjukkan bahwa di kecamatan itu banyak terjadi proses produksi barang dan jasa akhir.

Secara umum ada tiga kategori lapangan usaha yang berperan dominan pada pembentukan PDRB di masing-masing kecamatan, yaitu kategori industri pengolahan, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda



Indikator Ekonomi Kecamatan Kota Depok Tahun 2016

motor, serta kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Seluruh kecamatan di Kota Depok, kecuali Cilodong, Cimanggis, Tapos, dan Sawangan, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi kategori yang paling dominan di setiap kecamatan. Khusus untuk Kecamatan Cilodong, Cimanggis, dan Tapos, sektor yang paling dominan adalah sektor industri pengolahan. Dominannya sektor industri pengolahan pada ketiga kecamatan ini karena, pada ketiga kecamatan ini terdapat industri skala besar yang jumlahnya cukup banyak. Atau dengan kata lain, industri besar di Kota Depok letaknya terkonsentrasi pada tiga kecamatan ini.

Sub kategori industri pengolahan yang dominan di Kecamatan Cilodong adalah industri makanan dan minuman, serta industri mesin dan perlengkapan YTDL. Industri karet, barang dari karet dan plastik, serta industri kimia, farmasi dan obat tradisional, menjadi dua sub kategori industri pengolahan yang dominan di Kecamatan Cimanggis. Sedangkan di Kecamatan Tapos industri pengolahan yang dominan adalah industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik, serta industri karet, barang dari karet dan plastik.

Tabel 1. Kondisi Perekonomian Kecamatan di Kota Depok Tahun 2016

No	Kecamatan	PDRB Harga Berlaku (juta Rp)	PDRB per Kapita (Rp)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sawangan	2.792.611,88	18.024.642,14	76,05
2	Bojongsari	1.646.194,06	13.164.602,58	75,38
3	Pancoranmas	4.107.483,78	15.562.069,62	79,03
4	Cipayung	1.208.112,97	7.532.721,68	73,20
5	Sukmajaya	3.626.340,82	12.450.228,88	85,16
6	Cilodong	11.096.989,57	70.797.805,09	78,41
7	Cimanggis	14.107.966,02	46.500.784,51	82,95
8	Tapos	6.260.502,16	23.093.814,45	75,14
9	Beji	5.220.076,71	25.095.436,77	80,41
10	Limo	1.531.136,36	13.884.709,72	77,64
11	Cinere	1.790.661,83	13.290.348,61	83,76
	Kota Depok	53.388.076,14	24.492.044,11	79,60

4.2. Kecamatan Sawangan

Kecamatan Sawangan merupakan kecamatan di Kota Depok yang produksi pertaniannya paling tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Depok. *Sharing* kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dibangkitkan oleh Kecamatan Sawangan terhadap PDRB Kota Depok Tahun 2016 adalah sebesar 17,34 persen. Ini merupakan *sharing* tertinggi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pertanian yang diusahakan di Sawangan masih cukup berimbang antara tanaman bahan makanan, peternakan dan perikanan.

Dua kategori yang paling dominan di Kecamatan Sawangan adalah konstruksi (42,14 persen) dan perdagangan, hotel dan restoran (20,66 persen). Industri pengolahan yang paling dominan adalah industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, atau yang dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) masuk pada kode 16.

4.3. Kecamatan Bojongsari

Kategori lapangan usaha di Kecamatan Bojongsari yang mempunyai peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Depok adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan (15,78 persen).

Tanaman perkebunan dan perikanan merupakan kegiatan pertanian yang banyak diusahakan di Kecamatan Bojongsari. Bahkan 31,35 persen kegiatan perikanan yang ada di Kota Depok di usahakan di Kecamatan Bojongsari.

Industri furnitur menjadi sub kategori industri pengolahan yang mendominasi kegiatan industri di Kecamatan Bojongsari.

4.4. Kecamatan Pancoran Mas

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi kategori ekonomi yang sangat dominan di Kecamatan Pancoran Mas. Kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap pembentukan PDRB Kecamatan Pancoran Mas sebesar 37,76 persen, sedangkan secara sektoral kontribusi kategori ini terhadap Kota Depok adalah sebesar 13,40

persen. Bisa dikatakan bahwa Kecamatan Pancoran Mas merupakan salah satu sentra perdagangan di Kota Depok bersama dengan Kecamatan Beji, Cilodong dan Cimanggis.

Industri pengolahan tidak menjadi kategori basis ekonomi di Kecamatan Pancoran Mas. Namun industri yang sangat menonjol di Kecamatan Pancoran Mas adalah industri makanan dan minuman.

4.5. Kecamatan Cipayung

Kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Pancoran Mas ini secara ekonomi didominasi oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (38,60 persen) dan sektor industri pengolahan (19,63 persen). Industri pengolahan yang sangat mendominasi adalah industri tekstil, dan pakaian jadi. Nilai tambah yang dihasilkan dari industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki menyumbang 60,47 persen dari total nilai tambah kategori industri pengolahan di Kecamatan Cipayung.

4.6. Kecamatan Sukmajaya

Basis ekonomi di Kecamatan Sukmajaya terletak pada kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta kategori industri pengolahan. Andil kategori industri pengolahan sebesar 20,64 persen, sedangkan andil kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 32,48 persen.

Dua sub kategori industri pengolahan yang banyak dibangkitkan di Kecamatan Sukmajaya adalah Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional serta Industri Makanan dan Minuman.

Jika dilihat peranan secara sektoral terhadap pembentukan PDRB Kota Depok, maka kategori Jasa Lainnya mempunyai andil sektoral terbesar, yaitu sebesar 26,14 persen.

4.7. Kecamatan Cilodong

Peranan kategori industri pengolahan di Kecamatan Cilodong sangat besar, karena mempunyai andil sebesar 66,57 persen. Dimana 33,95 persen industrinya adalah industri Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL, serta 31,64 persen yang lain adalah industri makanan dan minuman. Kategori kedua yang mempunyai andil besar terhadap perekonomian Kecamatan Cilodong adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,33 persen). Kedua kategori ini jika digabungkan maka akan mempunyai andil sebesar 80,90 persen di Kecamatan Cilodong.

Jika dilihat *sharing* per sub kategori ekonomi, maka industri pengolahan di Kecamatan Cilodong mempunyai *sharing* sektoral terhadap PDRB Kota Depok sebesar 42,78 persen.

4.8. Kecamatan Cimanggis

Secara makro, Kecamatan Cimanggis mempunyai *sharing* terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Depok. PDRB Kota Depok pada Tahun 2016 sebesar 26,43 persennya dibentuk oleh unit-unit produksi yang ada di Kecamatan Cimanggis. Secara sektoral kategori konstruksi dan kategori transportasi dan pergudangan mempunyai andil yang besar terhadap PDRB Kota Depok. *Sharing* transportasi dan pergudangan di Kecamatan Cimanggis terhadap transportasi dan pergudangan di Kota Depok sebesar 48,09 persen, sedangkan *sharing* kategori konstruksinya sebesar 54,97 persen.

Industri pengolahan yang paling mendominasi adalah industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki, disusul industri pupuk, kimia, dan barang dari karet, serta industri alat angkut, mesin dan peralatannya.

4.9. Kecamatan Tapos

Besaran PDRB Kecamatan Tapos Tahun 2016 yang mencapai Rp 6,26 T, atau menempati rangking 3 di Kota Depok, meskipun IPM nya peringkat 10 dari 11 dan kemiskinannya peringkat 6 terbesar di Kota Depok, semakin menguatkan teorema

tertinggi ada di kategori jasa keuangan dan asuransi, dan itu pun hanya sebesar 8,58 persen.

Secara struktur, ekonomi di Kecamatan Limo di dominasi oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (28,11 persen), kategori jasa keuangan dan asuransi (12,25 persen), dan kategori konstruksi (8,90 persen). Untuk industri pengolahan memberikan andil sebesar 19,12 persen. Industri yang paling dominan di Kecamatan Limo adalah industri Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL.

4.12. Kecamatan Cinere

Tingkat kemiskinan dan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Cinere merupakan salah satu yang terbaik di Kota Depok. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa Cinere merupakan kecamatan dengan tingkat kesejahteraan dan kemajuan yang cukup baik di Kota Depok. Namun ternyata PDRB Kecamatan Cinere pada tahun 2016 menempati peringkat 8 dari 11 kecamatan di Kota Depok. PDRB per kapita pada tahun 2016 pun ada di peringkat 8. Keadaan yang terjadi di Kecamatan Cinere ini bertolak belakang dengan yang terjadi di Kecamatan Tapos.

Di Kecamatan Cinere memang tidak banyak terdapat unit-unit usaha yang melakukan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa akhir. Di Kecamatan Cinere lebih banyak dijumpai rumah dan perumahan untuk penduduk kelas menengah ke atas.

Ekonomi di Kecamatan Cinere didominasi oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (38,90 persen), serta kategori konstruksi (18,24 persen). Untuk kategori industri pengolahan yang dominan adalah industri Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman.

Tabel 2.
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok
Atas Dasar Harga Berlaku dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2016*) (Juta Rp)

LAPANGAN USAHA		010 Sawangan	011 Bojongsari	020 Pancoran Mas	021 Cipayung
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	134.339,45	122.273,19	106.263,61	60.694,61
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	331.574,76	359.611,97	261.680,40	237.165,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.712,15	8.645,82	18.249,07	11.088,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	807,93	445,26	16.794,24	430,02
F	Konstruksi	1.176.804,67	107.918,04	153.085,85	147.234,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	576.911,66	709.829,97	1.551.120,39	466.327,37
H	Transportasi dan Pergudangan	68.906,09	80.187,86	108.270,18	63.815,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	91.844,58	86.726,55	214.550,91	84.275,48
J	Informasi dan Komunikasi	19.416,59	12.928,07	402.986,71	20.491,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.386,51	29.908,55	262.220,68	2.219,63
L	Real Estat	161.047,45	30.752,50	129.564,31	21.598,34
M,N	Jasa Perusahaan	4.196,42	1.661,23	16.350,87	1.372,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.846,83	6.921,04	23.372,72	7.098,07
P	Jasa Pendidikan	51.320,56	45.064,01	185.413,55	50.412,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	91.508,01	2.779,28	96.968,09	3.118,12
R,S,T,U	Jasa lainnya	55.988,22	40.540,72	560.592,18	30.770,27
PDRB (Juta Rp)		2.792.611,88	1.646.194,06	4.107.483,78	1.208.112,97
Penduduk Tengah Tahun		154.933	125.047	263.942	160.382
PDRB Per Kapita (Rp)		18.024.642,14	13.164.602,58	15.562.069,62	7.532.721,68

*) Angka Sementara

Tabel 2.

Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2016*) (Juta Rp)

Lanjutan tabel

LAPANGAN USAHA		030 Sukmajaya	031 Cilodong	040 Cimanggis	041 Tapos
(1)		(6)	(7)	(8)	(9)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	64.164,61	36.278,68	37.806,20	106.942,36
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	748.391,58	7.386.729,02	3.245.289,25	3.861.897,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20.138,38	10.837,26	20.976,75	18.743,31
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.512,90	1.886,25	2.768,40	828,10
F	Konstruksi	206.063,06	1.432.384,90	5.438.043,22	189.683,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.177.899,37	1.589.939,09	1.472.225,79	1.185.132,82
H	Transportasi dan Pergudangan	177.660,37	221.256,26	1.181.562,72	303.797,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	198.862,16	135.003,39	349.615,71	222.525,05
J	Informasi dan Komunikasi	46.039,05	22.299,78	281.746,96	30.688,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	65.182,57	87.360,39	924.954,50	33.267,16
L	Real Estat	89.753,68	24.619,15	68.848,47	76.979,29
M,N	Jasa Perusahaan	9.236,25	4.798,03	24.342,25	10.129,58
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	205.962,17	13.903,09	82.025,48	52.371,15
P	Jasa Pendidikan	89.667,60	42.618,03	607.799,53	60.539,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	26.115,63	11.088,01	246.258,01	5.957,87
R,S,T,U	Jasa lainnya	490.691,43	75.988,25	123.702,78	101.018,84
PDRB (Juta Rp)		3.626.340,82	11.096.989,57	14.107.966,02	6.260.502,16
Penduduk Tengah Tahun		291.267	156.742	303.392	271.090
PDRB Per Kapita (Rp)		12.450.228,88	70.797.805,09	46.500.784,51	23.093.814,45

*) Angka Sementara



Tabel 2.
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok
Atas Dasar Harga Berlaku dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2016*) (Juta Rp)

Lanjutan tabel

LAPANGAN USAHA		050 Beji	060 Limo	061 Cinere	DEPOK
(1)		(10)	(11)	(12)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39.901,47	53.435,18	12.613,90	774.713,27
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	362.445,09	292.734,72	177.553,58	17.265.073,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14.381,86	7.624,48	9.315,56	150.713,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	764,97	583,17	1.537,05	37.358,30
F	Konstruksi	578.952,23	136.292,35	326.600,91	9.893.063,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.723.303,89	430.363,45	696.491,41	11.579.545,22
H	Transportasi dan Pergudangan	113.948,15	77.498,32	60.084,49	2.456.987,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	334.823,90	68.945,35	121.282,25	1.908.455,33
J	Informasi dan Komunikasi	53.731,11	18.833,00	29.210,10	938.371,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	524.085,26	187.562,49	66.070,05	2.187.217,79
L	Real Estat	105.423,02	70.355,78	43.293,80	822.235,80
M,N	Jasa Perusahaan	27.658,72	3.776,50	3.993,19	107.515,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.033.601,51	5.561,13	851,49	1.444.514,68
P	Jasa Pendidikan	117.684,16	48.538,62	92.723,44	1.391.781,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17.558,11	1.722,48	50.406,52	553.480,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	171.813,26	127.309,34	98.634,08	1.877.049,36
PDRB (Juta Rp)		5.220.076,71	1.531.136,36	1.790.661,83	53.388.076,14
Penduduk Tengah Tahun		208.009	110.275	134.734	2.179.813
PDRB Per Kapita (Rp)		25.095.436,77	13.884.709,72	13.290.348,61	24.492.044,11

*) Angka Sementara



Tabel 3.
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok
Atas Dasar Harga Konstan 2010 dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2016*) (Juta Rp)

LAPANGAN USAHA		010	011	020	021
		Sawangan	Bojongsari	Pancoran Mas	Cipayung
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	87.157,38	78.381,15	69.328,84	39.819,84
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	245.438,67	268.724,91	194.996,02	179.804,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.116,45	6.550,81	13.827,06	8.401,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	655,95	361,50	13.635,04	349,13
F	Konstruksi	946.235,34	86.773,84	123.092,00	118.387,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	431.016,57	530.447,80	1.144.400,02	349.356,56
H	Transportasi dan Pergudangan	40.492,45	47.686,63	64.474,18	37.591,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	62.537,86	59.046,20	146.092,93	57.371,76
J	Informasi dan Komunikasi	20.214,68	13.459,46	419.550,89	21.334,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.149,29	20.917,67	190.599,34	1.622,62
L	Real Estat	132.573,39	25.315,29	106.656,65	17.779,64
M,N	Jasa Perusahaan	3.553,38	1.406,67	13.845,33	1.162,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.623,94	4.646,02	15.689,85	4.764,86
P	Jasa Pendidikan	41.129,10	36.115,00	148.593,30	40.401,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72.792,01	2.210,83	77.135,35	2.480,37
R,S,T,U	Jasa lainnya	46.852,52	33.925,62	469.119,39	25.749,43
PDRB (Juta Rp)		2.150.538,98	1.215.969,40	3.211.036,19	906.377,16
Penduduk Tengah Tahun		154.933	125.047	263.942	160.382
PDRB Per Kapita (Rp)		13.880.444,95	9.724.098,97	12.165.688,62	5.651.364,60

*) Angka Sementara



Tabel 3.
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok
Atas Dasar Harga Konstan 2010 dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2016*) (Juta Rp)

Lanjutan tabel

LAPANGAN USAHA		030 Sukmajaya	031 Cilodong	040 Cimanggis	041 Tapos
(1)		(6)	(7)	(8)	(9)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42.017,31	23.442,88	24.429,95	69.386,16
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	566.387,17	5.448.115,82	2.456.648,92	2.904.416,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.258,57	8.211,24	15.893,78	14.201,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.535,29	1.531,42	2.247,63	672,33
F	Konstruksi	165.689,48	1.151.740,17	4.372.576,71	152.519,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	879.233,76	1.152.754,61	1.093.750,34	888.710,30
H	Transportasi dan Pergudangan	105.448,69	130.790,30	695.199,59	178.832,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	136.078,79	91.931,17	238.287,65	151.629,99
J	Informasi dan Komunikasi	47.931,41	23.216,38	293.327,76	31.949,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	47.222,10	64.166,09	682.853,94	23.271,35
L	Real Estat	73.884,74	20.266,35	56.675,69	63.368,94
M,N	Jasa Perusahaan	7.820,92	4.062,80	20.612,14	8.577,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	138.260,18	9.332,99	55.062,82	35.156,19
P	Jasa Pendidikan	71.861,01	34.154,75	487.100,00	48.517,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20.774,24	8.820,20	195.891,22	4.739,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	410.624,47	63.589,12	103.517,98	84.535,42
PDRB (Juta Rp)		2.737.028,13	8.236.126,29	10.794.076,13	4.660.484,50
Penduduk Tengah Tahun		291.267	156.742	303.392	271.090
PDRB Per Kapita (Rp)		9.396.972,99	52.545.752,17	35.577.985,34	17.191.650,39

*) Angka Sementara





Tabel 3.
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok
Atas Dasar Harga Konstan 2010 dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2016*) (Juta Rp)

Lanjutan tabel

LAPANGAN USAHA		050 Beji	060 Limo	061 Cinere	DEPOK
(1)		(10)	(11)	(12)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26.134,29	34.919,92	8.204,90	503.222,61
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	271.489,13	213.586,42	131.986,49	12.881.594,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.896,93	5.776,96	7.058,27	114.193,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	621,07	473,47	1.247,92	30.330,75
F	Konstruksi	465.519,11	109.588,82	262.610,56	7.954.732,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.273.603,93	321.561,31	512.376,35	8.577.211,55
H	Transportasi dan Pergudangan	69.095,71	46.070,41	35.354,94	1.451.037,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	230.876,48	46.947,32	82.618,83	1.303.418,97
J	Informasi dan Komunikasi	55.939,65	19.607,10	30.410,74	976.941,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	385.935,64	138.129,31	48.653,61	1.606.520,96
L	Real Estat	86.783,66	57.916,50	35.639,22	676.860,08
M,N	Jasa Perusahaan	23.420,41	3.197,81	3.381,29	91.040,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	693.845,51	3.733,13	571,60	969.687,08
P	Jasa Pendidikan	94.313,92	38.899,60	74.310,01	1.115.395,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13.966,98	1.370,18	40.096,95	440.277,65
R,S,T,U	Jasa lainnya	143.778,19	106.536,05	82.539,78	1.570.767,98
PDRB (Juta Rp)		3.846.220,61	1.148.314,33	1.357.061,47	40.263.233,18
Penduduk Tengah Tahun		208.009	110.275	134.734	2.179.813
PDRB Per Kapita (Rp)		18.490.645,17	10.413.188,24	10.072.153,04	18.470.957,46

*) Angka Sementara





Tabel 4.
Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok
Atas Dasar Harga Berlaku dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2016*) (persen)

LAPANGAN USAHA		010	011	020	021
		Sawangan	Bojongsari	Pancoran Mas	Cipayung
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,43	2,59	5,02	1,77
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	21,85	6,37	19,63	20,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,53	0,44	0,92	0,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,41	0,04	0,29
F	Konstruksi	6,56	3,73	12,19	5,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	43,12	37,76	38,60	32,48
H	Transportasi dan Pergudangan	4,87	2,64	5,28	4,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,27	5,22	6,98	5,48
J	Informasi dan Komunikasi	0,79	9,81	1,70	1,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,82	6,38	0,18	1,80
L	Real Estat	1,87	3,15	1,79	2,48
M,N	Jasa Perusahaan	0,10	0,40	0,11	0,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,42	0,57	0,59	5,68
P	Jasa Pendidikan	2,74	4,51	4,17	2,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,17	2,36	0,26	0,72
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,46	13,65	2,55	13,53
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara





Tabel 4.
Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok
Atas Dasar Harga Berlaku dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2016*) (persen)

Lanjutan tabel

LAPANGAN USAHA		030 Sukmajaya	031 Cilodong	040 Cimanggis	041 Tapos
(1)		(6)	(7)	(8)	(9)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,77	0,33	0,27	1,71
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	20,64	66,57	23,00	61,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,56	0,10	0,15	0,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,29	0,02	0,02	0,01
F	Konstruksi	5,68	12,91	38,55	3,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32,48	14,33	10,44	18,93
H	Transportasi dan Pergudangan	4,90	1,99	8,38	4,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,48	1,22	2,48	3,55
J	Informasi dan Komunikasi	1,27	0,20	2,00	0,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,80	0,79	6,56	0,53
L	Real Estat	2,48	0,22	0,49	1,23
M,N	Jasa Perusahaan	0,25	0,04	0,17	0,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,68	0,13	0,58	0,84
P	Jasa Pendidikan	2,47	0,38	4,31	0,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,72	0,10	1,75	0,10
R,S,T,U	Jasa lainnya	13,53	0,68	0,88	1,61
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara





Tabel 4.
Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok
Atas Dasar Harga Berlaku dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2016*) (persen)

Lanjutan tabel

LAPANGAN USAHA		050 Beji	060 Limo	061 Cinere	DEPOK
(1)		(10)	(11)	(12)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,76	3,49	0,70	1,45
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	6,94	19,12	9,92	32,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,28	0,50	0,52	0,28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,04	0,09	0,07
F	Konstruksi	11,09	8,90	18,24	18,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	33,01	28,11	38,90	21,69
H	Transportasi dan Pergudangan	2,18	5,06	3,36	4,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,41	4,50	6,77	3,57
J	Informasi dan Komunikasi	1,03	1,23	1,63	1,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,04	12,25	3,69	4,10
L	Real Estat	2,02	4,60	2,42	1,54
M,N	Jasa Perusahaan	0,53	0,25	0,22	0,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19,80	0,36	0,05	2,71
P	Jasa Pendidikan	2,25	3,17	5,18	2,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,34	0,11	2,81	1,04
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,29	8,31	5,51	3,52
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara





Tabel 5.
Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok
Atas Dasar Harga Konstan 2010 dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2016*) (persen)

LAPANGAN USAHA		010	011	020	021
		Sawangan	Bojongsari	Pancoran Mas	Cipayung
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,05	6,45	2,16	4,39
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	11,41	22,10	6,07	19,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,38	0,54	0,43	0,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,42	0,04
F	Konstruksi	44,00	7,14	3,83	13,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,04	43,62	35,64	38,54
H	Transportasi dan Pergudangan	1,88	3,92	2,01	4,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,91	4,86	4,55	6,33
J	Informasi dan Komunikasi	0,94	1,11	13,07	2,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,15	1,72	5,94	0,18
L	Real Estat	6,16	2,08	3,32	1,96
M,N	Jasa Perusahaan	0,17	0,12	0,43	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,40	0,38	0,49	0,53
P	Jasa Pendidikan	1,91	2,97	4,63	4,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,38	0,18	2,40	0,27
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,18	2,79	14,61	2,84
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara





Tabel 5.
Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok
Atas Dasar Harga Konstan 2010 dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2016*) (persen)

Lanjutan tabel

LAPANGAN USAHA		030 Sukmajaya	031 Cilodong	040 Cimanggis	041 Tapos
(1)		(6)	(7)	(8)	(9)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,54	0,28	0,23	1,49
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	20,69	66,15	22,76	62,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,56	0,10	0,15	0,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,31	0,02	0,02	0,01
F	Konstruksi	6,05	13,98	40,51	3,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32,12	14,00	10,13	19,07
H	Transportasi dan Pergudangan	3,85	1,59	6,44	3,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,97	1,12	2,21	3,25
J	Informasi dan Komunikasi	1,75	0,28	2,72	0,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,73	0,78	6,33	0,50
L	Real Estat	2,70	0,25	0,53	1,36
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,05	0,19	0,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,05	0,11	0,51	0,75
P	Jasa Pendidikan	2,63	0,41	4,51	1,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,11	1,81	0,10
R,S,T,U	Jasa lainnya	15,00	0,77	0,96	1,81
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara





Tabel 5.
Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok
Atas Dasar Harga Konstan 2010 dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2016*) (persen)

Lanjutan tabel

LAPANGAN USAHA		050 Beji	060 Limo	061 Cinere	DEPOK
(1)		(10)	(11)	(12)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,68	3,04	0,60	1,25
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	7,06	18,60	9,73	31,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,28	0,50	0,52	0,28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,04	0,09	0,08
F	Konstruksi	12,10	9,54	19,35	19,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	33,11	28,00	37,76	21,30
H	Transportasi dan Pergudangan	1,80	4,01	2,61	3,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,00	4,09	6,09	3,24
J	Informasi dan Komunikasi	1,45	1,71	2,24	2,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,03	12,03	3,59	3,99
L	Real Estat	2,26	5,04	2,63	1,68
M,N	Jasa Perusahaan	0,61	0,28	0,25	0,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18,04	0,33	0,04	2,41
P	Jasa Pendidikan	2,45	3,39	5,48	2,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,36	0,12	2,95	1,09
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,74	9,28	6,08	3,90
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara





Tabel 6.
Sharing Setiap Sub Sektor Ekonomi di Kecamatan
dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016*) (persen)

LAPANGAN USAHA		010	011	020	021
		Sawangan	Bojongsari	Pancoran Mas	Cipayung
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,34	15,78	13,72	7,83
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	1,92	2,08	1,52	1,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,11	5,74	12,11	7,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,16	1,19	44,95	1,15
F	Konstruksi	11,90	1,09	1,55	1,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,98	6,13	13,40	4,03
H	Transportasi dan Pergudangan	2,80	3,26	4,41	2,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,81	4,54	11,24	4,42
J	Informasi dan Komunikasi	2,07	1,38	42,95	2,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,20	1,37	11,99	0,10
L	Real Estat	19,59	3,74	15,76	2,63
M,N	Jasa Perusahaan	3,90	1,55	15,21	1,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,89	0,48	1,62	0,49
P	Jasa Pendidikan	3,69	3,24	13,32	3,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,53	0,50	17,52	0,56
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,98	2,16	29,87	1,64
PDRB		5,23	3,08	7,69	2,26

*) Angka Sementara





Tabel 6.
Sharing Setiap Sub Sektor Ekonomi di Kecamatan
dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016*) (persen)

Lanjutan tabel

LAPANGAN USAHA		030 Sukmajaya	031 Cilodong	040 Cimanggis	041 Tapos
(1)		(6)	(7)	(8)	(9)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,28	4,68	4,88	13,80
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	4,33	42,78	18,80	22,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,36	7,19	13,92	12,44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28,14	5,05	7,41	2,22
F	Konstruksi	2,08	14,48	54,97	1,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,17	13,73	12,71	10,23
H	Transportasi dan Pergudangan	7,23	9,01	48,09	12,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,42	7,07	18,32	11,66
J	Informasi dan Komunikasi	4,91	2,38	30,03	3,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,98	3,99	42,29	1,52
L	Real Estat	10,92	2,99	8,37	9,36
M,N	Jasa Perusahaan	8,59	4,46	22,64	9,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,26	0,96	5,68	3,63
P	Jasa Pendidikan	6,44	3,06	43,67	4,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,72	2,00	44,49	1,08
R,S,T,U	Jasa lainnya	26,14	4,05	6,59	5,38
PDRB		6,79	20,79	26,43	11,73

*) Angka Sementara





Tabel 6.
Sharing Setiap Sub Sektor Ekonomi di Kecamatan
dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016*) (persen)

Lanjutan tabel

LAPANGAN USAHA		050 Beji	060 Limo	061 Cinere	DEPOK
(1)		(10)	(11)	(12)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,15	6,90	1,63	100,00
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	2,10	1,70	1,03	100,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,54	5,06	6,18	100,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,05	1,56	4,11	100,00
F	Konstruksi	5,85	1,38	3,30	100,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,88	3,72	6,01	100,00
H	Transportasi dan Pergudangan	4,64	3,15	2,45	100,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,54	3,61	6,35	100,00
J	Informasi dan Komunikasi	5,73	2,01	3,11	100,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	23,96	8,58	3,02	100,00
L	Real Estat	12,82	8,56	5,27	100,00
M,N	Jasa Perusahaan	25,73	3,51	3,71	100,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	71,55	0,38	0,06	100,00
P	Jasa Pendidikan	8,46	3,49	6,66	100,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,17	0,31	9,11	100,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,15	6,78	5,25	100,00
PDRB		9,78	2,87	3,35	100,00

*) Angka Sementara





Tabel 7.
Sharing Setiap Sub Sektor Ekonomi di Kecamatan
dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016*) (persen)

LAPANGAN USAHA		010	011	020	021
		Sawangan	Bojongsari	Pancoran Mas	Cipayung
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,32	15,58	13,78	7,91
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	1,91	2,09	1,51	1,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,11	5,74	12,11	7,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,16	1,19	44,95	1,15
F	Konstruksi	11,90	1,09	1,55	1,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,03	6,18	13,34	4,07
H	Transportasi dan Pergudangan	2,79	3,29	4,44	2,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,80	4,53	11,21	4,40
J	Informasi dan Komunikasi	2,07	1,38	42,95	2,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,20	1,30	11,86	0,10
L	Real Estat	19,59	3,74	15,76	2,63
M,N	Jasa Perusahaan	3,90	1,55	15,21	1,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,89	0,48	1,62	0,49
P	Jasa Pendidikan	3,69	3,24	13,32	3,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,53	0,50	17,52	0,56
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,98	2,16	29,87	1,64
PDRB		5,34	3,02	7,98	2,25

*) Angka Sementara





Tabel 7.
Sharing Setiap Sub Sektor Ekonomi di Kecamatan
dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016*) (persen)

Lanjutan tabel

LAPANGAN USAHA		030 Sukmajaya	031 Cilodong	040 Cimanggis	041 Tapos
(1)		(6)	(7)	(8)	(9)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,35	4,66	4,85	13,79
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	4,40	42,29	19,07	22,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,36	7,19	13,92	12,44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28,14	5,05	7,41	2,22
F	Konstruksi	2,08	14,48	54,97	1,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,25	13,44	12,75	10,36
H	Transportasi dan Pergudangan	7,27	9,01	47,91	12,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,44	7,05	18,28	11,63
J	Informasi dan Komunikasi	4,91	2,38	30,03	3,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,94	3,99	42,51	1,45
L	Real Estat	10,92	2,99	8,37	9,36
M,N	Jasa Perusahaan	8,59	4,46	22,64	9,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,26	0,96	5,68	3,63
P	Jasa Pendidikan	6,44	3,06	43,67	4,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,72	2,00	44,49	1,08
R,S,T,U	Jasa lainnya	26,14	4,05	6,59	5,38
PDRB		6,80	20,46	26,81	11,58

*) Angka Sementara





Tabel 7.
Sharing Setiap Sub Sektor Ekonomi di Kecamatan
dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016*) (persen)

Lanjutan tabel

LAPANGAN USAHA		050 Beji	060 Limo	061 Cinere	DEPOK
(1)		(10)	(11)	(12)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,19	6,94	1,63	100,00
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	2,11	1,66	1,02	100,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,54	5,06	6,18	100,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,05	1,56	4,11	100,00
F	Konstruksi	5,85	1,38	3,30	100,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,85	3,75	5,97	100,00
H	Transportasi dan Pergudangan	4,76	3,17	2,44	100,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,71	3,60	6,34	100,00
J	Informasi dan Komunikasi	5,73	2,01	3,11	100,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	24,02	8,60	3,03	100,00
L	Real Estat	12,82	8,56	5,27	100,00
M,N	Jasa Perusahaan	25,73	3,51	3,71	100,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	71,55	0,38	0,06	100,00
P	Jasa Pendidikan	8,46	3,49	6,66	100,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,17	0,31	9,11	100,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,15	6,78	5,25	100,00
PDRB		9,55	2,85	3,37	100,00

*) Angka Sementara



DATA MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DEPOK**

**JL. BOULEVARD KOTA KEMBANG, CILODONG KOTA DEPOK
TELP. 021-7710370, FAX. 021-77825913
EMAIL : BPS3276@BPS.GO.ID**

